

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen publik

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.*
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor. (n.d.). *Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor tahun 2020 Unaudited.*
- kementerian Keuangan. (2019). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.*
- Kementerian keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.*
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Profil Struktur Organisasi KPPN Bogor.* Retrieved April 22, 2022, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bogor/id/profil/struktur-organisasi.html>
- Kementerian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.*
- Kementerian Keuangan. (2020). *Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- Kementerian Keuangan Republik indonersia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap.* In *PSAP O7 tentang Aset Tetap.*

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Maret 1983 Nomor 205/KMK.01/1983*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1989a). *Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor: SE-1077/A/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1989b). *Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004a). *Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK/2004*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004b). *Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (audited)*.

2. Buku dan Jurnal

- Brilliant, L., & Sulaeman, A. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM MANAJEMEN ASET TETAP SATUAN KERJA. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 80–99.
- Cristy, O. F. (2020). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur*. STIE Perbanas Surabaya.

- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- Herdiyana, D., & Rokhim, M. L. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 53–70.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi kedua* (S. yayat Hayati (ed.); kedua). Erlangga.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2019). Pengaruh Nilai Aset Tetap dan Belanja Modal dalam Alokasi Belanja Pemeliharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 92–101.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (M. Sandra (ed.)).